



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11207-11219

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP): Tantangan dan Prospek Menuju Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera

Thifli Ahmad^{1✉}, Alfani Jamil², Ahmad Zidan³, Yusril Huda⁴

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Email: ivanpahlevi323@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya, pada 7 Juni 2024. RIPPP 2022-2041 dirancang dengan visi "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" dan tiga misi utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Kebijakan dan strategi pembangunan diarahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah otonom baru, dengan penguatan regulasi, perencanaan terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi melalui SIPPP. Meskipun RIPPP dan SIPPP memiliki visi yang jelas, tantangan implementasi di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan potensi penyalahgunaan anggaran, harus diatasi melalui pengawasan ketat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi anggaran, serta kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah.

Kata Kunci: *Ekonomi, Pembangunan, Ikatan Lemah*

Abstract

Vice President of Indonesia, Ma'ruf Amin, launched the Papua Development Acceleration Master Plan (RIPPP) and the Papua Development Acceleration Information System (SIPPP) in Sorong, Southwest Papua. Information System for Accelerating Papua Development (SIPPP) in Sorong, Southwest Papua, on June 7, 2024. RIPPP 2022-2041 is designed with a vision of "The realization of an Independent, Just and Prosperous" and three main missions: Healthy Papua, Smart Papua, and Productive Papua. Productive. Development policies and strategies are directed at strengthening the role of new autonomous regional governments, by strengthening regulations, integrated planning, and utilization of information technology through SIPPP. Although the RIPPP and SIPPP have a clear vision, implementation challenges on the ground, such as infrastructure limitations and the potential for budget misuse, must be addressed through close supervision, increased human resource capacity, budget transparency, and cooperation with the private sector and non-governmental organizations. Organizations.

Keyword: *Economy, Development, The Strength of Weak Ties*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur yang ada. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warungnya (Budiman, 2000). Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian proyek infrastruktur ambisius telah diluncurkan, menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah pemerataan pembangunan supaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.

Inisiatif proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi membuat bisnis lebih dapat diandalkan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia.

Kesenjangan antarwilayah tidak berkurang meskipun beberapa daerah memiliki kekayaan alam, yang diduga disebabkan oleh kurangnya keterlibatan elit politik dalam menerapkan kontrak dengan baik (Bhattacharyya & Hodler, 2014). Pola ketimpangan antarwilayah di Indonesia dapat diamati secara keseluruhan, mencakup perbedaan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, serta antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa (Rustiadi et al., 2011). Kegagalan pembangunan di Papua tidak terlepas dari konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2016) menekankan bahwa setiap kebijakan dan program di Papua harus memperhatikan dua kata kunci, yaitu perdamaian dan pembangunan. Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Papua merupakan Propinsi paling Timur di Republik Indonesia dan merupakan daerah yang relatif belum banyak dirambah oleh aktivitas manusia dibanding daerah lain di Indonesia.

Papua, dengan segala kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, telah lama menghadapi tantangan dalam hal pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah pusat menyadari bahwa upaya pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini dan untuk memajukan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia yang maju dan sejahtera. Pembangunan di Papua pun masih bilang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menyebabkan kualitas hidup masih terbilang jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua (Hardiyanto & Saryono, 2023).

Dalam upaya tersebut, Pemerintah telah menyusun RIPP Tahun 2022-2041 dengan visi besar "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" yang dirinci ke dalam tiga misi utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan OAP melalui penguatan regulasi dan kebijakan. Salah satu inovasi penting dalam percepatan pembangunan Papua adalah pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Berbeda dengan badan khusus sebelumnya, BPP melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua. Partisipasi langsung OAP dalam kebijakan pembangunan diharapkan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua benar-benar terakomodasi dalam berbagai program pembangunan.

Penelitian ini relevan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika pembangunan di Papua dan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada dalam pelaksanaan RIPP dan SIPP. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua. Sehingga dalam fenomena ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran Pemerintah terhadap pembangunan Papua. Dinamika dalam jejaring sosial ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek yakni Visi dan Misi, Kebijakan dan Strategi, serta Implementasi dan Evaluasi.

Selain itu, fenomena sosiologis yang menjadi fokus penelitian juga mencakup aspek sosial ekonomi yang terkait dengan peran masyarakat Papua terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini meliputi bagaimana dampak adanya peluncuran RIPP dan SIPP terhadap percepatan pembangunan di Papua, Peran dan efektivitas BPP dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan partisipatif, dan Persepsi dan partisipasi masyarakat Papua, khususnya OAP, terhadap kebijakan pembangunan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika sosial ekonomi yang terjadi di Papua.

KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan terjadi, didorong oleh industrialisasi dan investasi dalam infrastruktur. Urbanisasi meningkat, dan sektor industri menjadi tulang punggung ekonomi (Rostow, 1960). Pada tahap ini, industrialisasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan banyak perusahaan dan pabrik baru bermunculan. Investasi dalam infrastruktur, seperti jaringan transportasi dan energi, juga meningkat pesat untuk mendukung ekspansi sektor industri yang sedang berkembang. Sektor industri, termasuk manufaktur dan produksi, menjadi tulang punggung ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi populasi yang semakin bertambah dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara.

Granovetter mengungkapkan gagasannya tentang teori jaringan sosial dalam bukunya yang berjudul "The Sociology of Economic life". Dalam buku tersebut, Granovetter menjelaskan bahwasanya teori jaringan sosial memiliki konsep yang menyoroti hubungan sosial antara aktor (individu atau kelompok) yang didasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain dan berusaha mempertahankan norma-norma sosial yang ada. Terbentuknya jaringan sosial juga dipengaruhi karena adanya rasa saling kenal, saling memberi informasi, dan saling membantu dalam mengatasi masalah atau mencapai suatu tujuan bersama. Dengan adanya teori jaringan sosial dapat menilai bahwa setiap aktor (individu atau kelompok) memiliki akses yang berbeda dalam mendapatkan sumber daya (kekayaan, kekuasaan, atau informasi). Sehingga Jaringan sosial menjadi hal yang penting dalam masyarakat untuk menjadi bagian dari jaring-jaring hubungan sosial tersebut yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi.

Mark Granovetter menjelaskan bahwa ikatan lemah yang menghubungkan satu kelompok orang dengan kelompok lainnya. Sedangkan Ikatan Kuat antara dua individu menunjukkan adanya hubungan yang tumpang tindih antara dua kelompok tersebut. Hubungan yang menjadi titik penghubung antara kelompok dengan kelompok lainnya disebut sebagai jembatan lokal. Ikatan kuat dapat diperoleh dari hubungan dua individu yang saling memiliki kepercayaan, sering berinteraksi satu sama lain, dan berada didalam lingkungan yang sama. Ikatan kuat dapat kita lihat dari hubungan keluarga, kekerabatan, dan tetangga. Semenrara ikatan lemah ini muncul dari hubungan ikatan kuat.

Dengan cara yang intuitif, hal ini menyiratkan bahwa informasi atau pesan yang ingin disebarkan memiliki potensi untuk mencapai lebih banyak orang dan menjangkau jarak sosial yang lebih luas ketika melalui ikatan yang lemah daripada yang kuat. Namun, jika motivasi untuk menyebarkan rumor tersebut berkurang setiap kali disampaikan kembali, maka rumor yang beredar melalui ikatan yang kuat cenderung terbatas pada sejumlah kecil orang, sementara yang melalui ikatan yang lemah memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak orang; hal ini menggambarkan bahwa jembatan antara kelompok sosial tidak akan terbentuk. (Granovetter, 1973).

Dengan jembatan lokal ini yang menunjukkan adanya proses penyebaran informasi atau ide baru dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Granovetter memperlihatkan dalam beberapa studinya bahwa penyebaran informasi atau rumor yang paling cepat adalah melalui orang yang memiliki ikatan sosial yang lemah. Oleh karena itu, Granovetter menekankan bahwa pentingnya untuk mempertahankan ikatan lemah tersebut, seperti rekan kerja sebelumnya, kenalan yang pernah ketemu. karena akan bisa memberikan akses terbuka ke kelompok orang atau informasi yang tidak bisa kita peroleh dari ikatan kuat.

Teori "Strength of Weak Ties" dari Granovetter memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami strategi pembangunan yang diluncurkan di Papua. Dengan meningkatkan partisipasi langsung OAP dan memperkuat jaringan antara berbagai pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat memaksimalkan aliran informasi dan ide yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lompatan kesejahteraan yang signifikan di Papua

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dan pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu dari perspektif mereka yang mengalaminya, dapat memberikan wawasan berharga dalam menganalisis peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin. Dalam konteks peluncuran RIPPP dan SIPPP, fenomenologi dapat digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi Orang Asli Papua (OAP) mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan. Dengan menekankan pentingnya keterlibatan langsung perwakilan OAP dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), fenomenologi memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana OAP merasakan perubahan, tantangan, dan manfaat dari upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Fenomenologi membantu mengeksplorasi bagaimana OAP merasakan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Pengalaman ini mencakup bagaimana mereka melihat peran mereka dalam BPP, apakah mereka merasa didengar dan diakui dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, kita dapat memahami makna yang diberikan oleh OAP terhadap kebijakan pembangunan yang diterapkan. Ini melibatkan persepsi mereka tentang visi "Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" dan bagaimana mereka menginterpretasikan tujuan "Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif" dalam konteks kehidupan mereka.

Pendekatan fenomenologi memungkinkan analisis tentang bagaimana perubahan sosial dan ekonomi yang diusung oleh RIPPP dan SIPPP dirasakan oleh OAP. Ini termasuk pemahaman tentang perubahan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi, serta dampak jangka panjang dari inisiatif-inisiatif tersebut. Fenomenologi juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari OAP dalam kebijakan

pembangunan. Analisis ini dapat mengungkapkan sejauh mana OAP merasa terlibat dan diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana partisipasi mereka mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, penerapan pendekatan fenomenologi dalam analisis peluncuran RIPPP dan SIPPP dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh OAP terhadap upaya percepatan pembangunan di Papua. Pendekatan ini menyoroti pentingnya mendengarkan suara dan perspektif OAP untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta membawa dampak positif yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Ballroom Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (7/6/2024). Acara ini mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Papua. Dalam pidatonya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan di Papua menjadi prioritas utama pemerintah, sesuai dengan komitmen untuk mewujudkan pembangunan Indonesia-sentris yang mengurangi ketimpangan antarwilayah. Wapres menjelaskan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong untuk memperkuat peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi. RPP 2022-2041 telah disusun dengan visi "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" serta tiga misi utama: "Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif".

Dokumen ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua. Arah kebijakan pembangunan Papua juga telah diselaraskan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang bertema Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Desain dan kerangka perencanaan ini diharapkan membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru untuk mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. Wapres yakin percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan adanya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Berbeda dengan badan khusus sebelumnya, BPP melibatkan langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di Papua untuk memastikan partisipasi langsung dalam kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

Dalam konteks peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, teori "Strength of Weak Ties" dari sosiolog Mark Granovetter dapat memberikan perspektif menarik mengenai dinamika sosial dan pengaruh jaringan sosial dalam proses pembangunan. Granovetter dalam teorinya menyatakan bahwa hubungan atau "ties" yang lebih lemah, seperti kenalan atau hubungan antar komunitas yang tidak terlalu dekat, seringkali lebih penting dalam menyebarkan informasi dan inovasi dibandingkan dengan hubungan yang lebih kuat atau dekat, seperti keluarga dan teman dekat. Hal ini karena hubungan yang lebih lemah biasanya menghubungkan individu dengan kelompok sosial yang berbeda dan lebih luas, yang memungkinkan penyebaran ide dan sumber daya yang lebih luas pula.

Peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Sorong, Papua Barat Daya pada 7 Juni 2024 menandai langkah signifikan dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia-sentris untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua (OAP).

Visi dan Misi RIPPP

RIPPP Tahun 2022-2041 diusung dengan visi besar "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" yang diterjemahkan ke dalam tiga misi utama:

1. Papua Sehat: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan tenaga medis lokal.
2. Papua Cerdas: Meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dengan membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memberikan beasiswa dan pelatihan bagi para guru dan siswa.
3. Papua Produktif: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha kecil menengah (UKM), serta meningkatkan akses terhadap pasar dan teknologi.

Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, RIPPP menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah otonom baru. Beberapa strategi utama meliputi:

1. Penguatan Regulasi: Penyusunan dan penetapan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan OAP.
2. Perencanaan Terintegrasi: Integrasi perencanaan pembangunan Papua ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pengembangan SIPPP untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan data yang akurat dan terkini.

Peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pembentukan BP3OKP atau Badan Pengarah Papua (BPP) menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan Papua. BP3OKP berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena:

1. Keterlibatan Langsung OAP: BPP melibatkan perwakilan OAP dari setiap provinsi di Papua, memastikan partisipasi langsung dan aspirasi OAP terakomodasi dalam kebijakan percepatan pembangunan.
2. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan.

Implementasi dan Evaluasi

1. Pelaksanaan RIPPP dan SIPPP diharapkan dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam pembangunan Papua. Beberapa langkah implementasi yang akan dilakukan meliputi:
2. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang tujuan, strategi, dan manfaat RIPPP dan SIPPP.
3. Kolaborasi dan Sinergi: Membangun kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan.
4. Monitoring dan Evaluasi: Menggunakan SIPPP untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Keterkaitan dengan Pembangunan Papua Adanya Partisipasi Orang Asli Papua (OAP) yakni Wapres menekankan pentingnya partisipasi langsung OAP dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Melibatkan OAP dalam badan seperti Badan Pengarah Papua (BPP) dapat dilihat sebagai upaya memperkuat jaringan yang lemah namun penting, antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Melalui partisipasi langsung ini, jaringan antara OAP dan berbagai level pemerintahan menjadi lebih kuat, memungkinkan aliran informasi dan ide yang lebih efektif dan inklusif. Penguatan Regulasi dan Otonomi Daerah karena dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang didorong untuk menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru, ada peningkatan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Interaksi ini menciptakan jaringan baru yang mungkin sebelumnya tidak ada atau lemah, yang dapat memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik antara berbagai daerah di Papua dan pusat.

RIPPP dan SIPPP sebagai Platform Integrasi sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) berfungsi sebagai platform yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah contoh bagaimana "weak ties" dapat diperkuat melalui teknologi informasi untuk memastikan bahwa berbagai ide, inovasi, dan informasi tentang pembangunan dapat dengan mudah diakses dan disebar. Sistem ini dapat menghubungkan berbagai aktor pembangunan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat OAP, sehingga memperluas jangkauan informasi dan kolaborasi. Visi Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif adalah misi besar yang diusung RIPPP, yaitu Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, membutuhkan keterlibatan banyak pihak dari berbagai sektor. Untuk mencapai misi ini, penting untuk menciptakan dan memanfaatkan jaringan yang luas dan inklusif, yang mencakup berbagai lapisan masyarakat dan organisasi. Hal ini sejalan dengan teori Granovetter bahwa ikatan lemah memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan inovasi yang bisa membantu mencapai tujuan pembangunan.

Peluncuran RIPPP dan SIPPP merupakan langkah konkret dan komprehensif dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Dengan visi besar "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" dan tiga misi utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, diharapkan pembangunan di Papua dapat lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Keberadaan BP3OKP yang melibatkan langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di Papua akan memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pembangunan, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Meskipun RIPPP dan SIPPP sudah diluncurkan dengan visi dan misi yang jelas, seringkali tantangan terbesar adalah implementasi di lapangan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang

efektif. Rencana induk yang ambisius harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua masih sangat terbatas. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, program-program pembangunan lainnya mungkin sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Salah satu isu yang sering muncul dalam proyek pembangunan di daerah terpencil adalah penyalahgunaan anggaran. Meskipun ada regulasi yang ketat, pengawasan yang kurang efektif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Meskipun BP3OKP melibatkan perwakilan OAP, partisipasi masyarakat secara luas masih perlu ditingkatkan. Banyak program pembangunan yang gagal karena tidak melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Banyak proyek pembangunan yang berjalan hanya selama masa kepemimpinan tertentu dan tidak berkelanjutan. RIPPP dan SIPPP perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang diinisiasi memiliki rencana keberlanjutan jangka panjang yang tidak bergantung pada satu periode kepemimpinan saja. Oleh karena itu untuk memastikan implementasi yang efektif, perlu dibentuk tim pengawas independen yang bertugas untuk memantau progres di lapangan dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek. Penggunaan teknologi seperti SIPPP harus dioptimalkan untuk menyediakan data yang transparan dan akurat.

Fokus awal perlu diberikan pada pembangunan infrastruktur dasar. Ini mencakup peningkatan akses jalan, transportasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi bagi pembangunan sektor lain. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Papua melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini termasuk pelatihan teknis bagi tenaga medis, guru, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dengan melibatkan lembaga-lembaga independen dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Penggunaan SIPPP untuk melacak aliran dana dapat membantu mengurangi penyalahgunaan anggaran.

Mengadakan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Ini akan memastikan bahwa program-program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memiliki rencana keberlanjutan yang jelas. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi jangka panjang dan keberlanjutan proyek di Papua. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pembangunan daerah terpencil. Kolaborasi ini dapat membawa inovasi dan sumber daya tambahan yang penting untuk

percepatan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan RIPPP dan SIPPP dapat lebih efektif dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Papua, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

SIMPULAN

Peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Sorong, Papua Barat Daya, merupakan langkah penting dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua (OAP) melalui pembangunan yang Indonesia-sentris. RIPPP 2022-2041 dengan visi "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" serta misi "Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif" berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Papua. Teori "Strength of Weak Ties" dari Mark Granovetter memberikan perspektif tambahan dalam konteks ini, menunjukkan bagaimana hubungan sosial yang lebih lemah dapat memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan inovasi, yang relevan untuk pembangunan Papua yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi RIPPP dan SIPPP menghadapi tantangan signifikan, termasuk kebutuhan akan infrastruktur dasar, pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat setempat. BP3OKP berperan penting dengan melibatkan perwakilan OAP dari setiap provinsi di Papua, memastikan partisipasi langsung dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Kesimpulannya, peluncuran RIPPP dan SIPPP adalah langkah strategis yang berpotensi membawa perubahan besar dalam pembangunan Papua. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, inisiatif ini dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia ketiga*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Granovetter, M., & Swedberg, R. (1992). *The Sociology of Economic Life*. Westview Press.
- Granovetter, M. (1973). *The Strength of Weak Ties*. *American Journal of Sociology* 78:1360-1380.

- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth*. Cambridge University Press.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Cetakan Ketiga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asaju, K. (2022). Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Intricacies and Dynamics of Development Administration. *Journal Of Contemporary Sociological Issues*, 2(2), 173-189. <https://doi.org/10.19184/csi.v2i2.27890>
- Baransano, M.A., (2011). *Analisis Disparitas Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat*. Thesis. Institut Pertanian Bogor.
- Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2014). Do natural resource revenues hinder financial development? The role of political institutions. *World Development*, 57, 101-113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.003>
- Elisabeth, A. (2016). Perdamaian dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi?. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 13. <https://doi.org/10.14203/JPP.V9i1.444>
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>
- Prasetyo, H., Farid, M., Singgih, M., Roziq, A., Mulyono, R. D. A. P., & Shulthoni, Moch. (2022). Escalation of Village Enterprises in Developing Digitalized Financial Management Innovations in the Tapal Kuda Area. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 42-49.
- Suci-Dharmayanti, A. W., Handayani, B. L., Kurniawati, D., Purbasari, D., Pradana, G. H., & Hanantara, A. (2019). Pemetaan potensi desa sebagai model untuk membangun desa sehat dan mandiri (studi kasus: Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso). *E-Prosiding SNasTekS*, 1(1), 67-76.
- Oktaviana, M. G., Sulistio, H., & Wicaksono, A. (2011). Strategi Pengembangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 5 (3), 180-190. ISSN 1978 – 5658. <http://Rekayasasipil.Ub.Ac.Id/Index.Php/Rs/Article/View/204/197>
- Oktaviana, M. G., Sulistio, H., & Wicaksono, A. (2012). Strategi Pengembangan Transportasi Antar Wilayah di Propinsi Papua Barat. *Rekayasa Sipil*, 5(3), pp. 180-190.
- Kamil, I., & Krisiandi. (2024). Wapres Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/10143731/wapres-luncurkan-rencana-induk-percepatan-pembangunan-papua>